

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ribuan pulau yang berada di dalam laut Indonesia ini yang terdiri dari bermacam-macam warna suku bangsa, agama, golongan, serta memiliki 33 provinsi. Oleh karena bermacam-macam warna suku bangsa inilah terdapat bermacam-macam pula kebudayaan, adat istiadat, ciri-ciri, kehendak, kebiasaan, bahasa, dan kepercayaan di Indonesia.

Pada dasarnya mengatur dan mengurus sejumlah orang yang semuanya sama, baik budaya, adat, ciri-ciri, kehendak, kebiasaan, dan kepercayaan sudah pasti jauh lebih mudah dan tidak sulit, daripada mengurus sejumlah orang yang berbeda-beda. Apalagi kalau orang-orang yang berbeda itu tidak bisa bergaul, bermasyarakat dan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang berbeda lainnya.

Bangsa Indonesia merupakan sebuah Negara yang multi etnis. Menurut M. Ainul Yaqin (2005:206), hal ini terbukti dengan adanya penjelasan tiga peneliti senior Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin dan Aris Ananta dari Institute Of Southeast Asian Studies yang menyebutkan ada sekitar 1000 etnis atau sub etnis di Indonesia. Perlu kita sadari, dengan kondisi seperti

ini menyimpan potensi besar timbulnya pertentangan antaretnis yang satu dengan yang lain.

Menurut M. Ainul Yaqin (2005:207-211), beberapa peneliti berpendapat bahwa faktor politis, ekonomis, dan primordialisme kesukuan dapat melatarbelakangi timbulnya konflik antaretnis di nusantara ini. Berikut faktor-faktor yang dapat melatarbelakangi timbulnya konflik antaretnis, yaitu :

1. Faktor Politik

Kondisi politik, dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan/bentrokan antaretnis antara dua sebab yaitu adanya ketimpangan dalam pembagian wilayah politik dan adanya politisasi pertentangan antar etnis. Ketimpangan pembagian wilayah politik dapat menyebabkan timbulnya kekerasan antaretnis karena etnis merasa sulit mendapatkan posisi yang strategis (merasa termarjinalkan hak politiknya) akan mempunyai kecemburuan politis terhadap etnis yang mayoritas hak politiknya.

Sementara itu, politisasi benih-benih pertentangan antaretnis juga dapat menjadi penyebab timbulnya kekerasan antaretnis. Sebagian peneliti menduga bahwa campur tangan pihak-pihak tertentu, meskipun sulit membuktikannya, dapat semakin menyalakan bara api pertentangan di antara dua etnis yang berselisih.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab timbulnya kekerasan antaretnis. Ketimpangan kondisi social-ekonomi yang sangat tajam antara dua kelompok etnis yang berbeda dapat menyebabkan etnis yang terpinggirkan secara ekonomi melakukan gerakan-gerakan perlawanan. Salah satu bentuknya dapat berupa adanya tindak kekerasan terhadap pihak yang dominan kekuasaan ekonominya.

3. Primordialisme Kesukuan

Faktor berikutnya yang dapat memicu konflik etnis adalah primordialisme kesukuan. Faktor ini dapat menjadi penyebab timbulnya permusuhan antaretnis karena kuatnya rasa kesukuan ini dapat menghilangkan dimensi-dimensi kemanusiaan, moral, etika, dan hukum yang seharusnya di utamakan dalam setiap penyelesaian masalah.

Menurut E.Brown Dalam bukunya *The Ethnicity Reader* (1997:87), adapun pengaruh dari banyaknya perbedaan ini, salah satunya dapat menimbulkan konflik antar etnis. Konflik etnis ini merupakan konflik yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya dan teritorial antara dua komunitas etnis atau lebih

Menurut Nasikun (dalam Nasikun,2007:5), konflik pada hakikatnya merupakan suatu gejala sosial yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, dan melekat pula di kehidupan suatu bangsa.

Menurut Ranjabar (dalam Jacobus Ranjabar,2006), Sumber-sumber untuk konflik antara suku bangsa atau golongan dalam masyarakat Indonesia Majemuk, paling tidak ada lima macam, yaitu:

1. Konflik jelas akan terjadi kalau satu suku bangsa mendominasi suatu suku yang lain secara politis. Pada tingkat yang bersifat politis ini, konflik tersebut terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat.
2. Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup bersama.
3. Konflik bisa terjadi kalau satu dari suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaannya kepada warga dari suatu suku bangsa yang lain.
4. Konflik bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa yang lain secara ideologis. Pada tingkatan yang bersifat ideologis, konflik tersebut berwujud di dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang di anut.
5. Potensi konflik terpendam yang ada dalam hubungan antara suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat.

Provinsi Lampung merupakan daerah transmigrasi. Penyelenggaraan transmigrasi di Provinsi Lampung pertama kali dimulai pada tahun 1905 yang dikenal dengan program kolonisasi dengan penempatan pertama sejumlah 155 KK transmigran yang berasal dari daerah Kedu Jawa Tengah ke Desa Bagelen Gedong Tataan, 25 km sebelah Barat Kota Bandar Lampung.

Sejak tahun 1905 hingga tahun 1943 di Provinsi Lampung telah ditempatkan transmigran sebanyak 51.010 KK atau 211.720 jiwa di kawasan Gedong Tataan, Gadingrejo Wonosobo Lampung Selatan, dan kawasan Metro, Sekampung Trimurjo dan Batang Hari di Lampung Tengah. Berdasarkan keberhasilan penempatan pertama tersebut kemudian pada tanggal 12 Desember 1950, sebanyak 23 KK dengan 77 jiwa transmigran ditempatkan di Provinsi Lampung melalui pola Trans Tuna Karya, Trans Bencana Alam dan Trans Pramuka.

Tanggal 12 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi. Pada periode 1950 – 1969 penempatan transmigran ke Provinsi Lampung mencapai 53.263 KK atau sebanyak 221.035 jiwa dengan Pola Tanaman Pangan. Total perpindahan penduduk ke Provinsi Lampung melalui program transmigrasi dari tahun 1905 hingga tahun 1969 sejumlah 104.273 KK atau 432.755 jiwa

Lampung daerah yang multi etnis karena merupakan daerah transmigran, warga nya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dari masyarakat asli Lampung, Bali, Jawa, Padang, Batak, Aceh, Jambi, Bugis dan masih

banyak lagi masyarakat suku lain yang tinggal di Lampung. Keadaan seperti ini tentunya dipertahankan bukan malah menjadi potensi konflik antar etnis karena kita harus menerima keragaman suku di Lampung.

Berdasarkan prariset di Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Mei 2012 lalu oleh Bapak Erwin Bakar selaku Kabid Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Konflik, potensi konflik antar etnis di Lampung memang ada, karena melihat dari bermacam-macam suku, ras dan agama. Tentunya dari bermacam-macam suku ini, bermacam-macam pula pemikiran, kebiasaan, perilaku dan sifat seseorang. Pemikiran, kebiasaan, perilaku dan sifat tiap orang yang satu suku saja berbeda, apalagi pemikiran, kebiasaan, perilaku dan sifat seseorang yang berbeda suku.

Menyatukan pemikiran, kebiasaan, perilaku dan sifat antara orang yang satu dengan orang yang lain atau suku yang satu dengan suku yang lain tidak lah mudah. Apalagi sampai terjadi perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak yang berbeda suku, bahkan bisa berujung pada konflik yang mengatasnamakan etnis. Konflik antar etnis mudah terjadi apabila tidak ada rasa saling menghormati perbedaan masing-masing suku.

Menurut Bapak Erwin Bakar selaku Kabid Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, Lampung sendiri pernah terjadi konflik antar etnis, dalam hal ini etnis yang sering bertikai adalah antara

Lampung dan Bali. Sudah beberapa kali etnis Lampung dan Bali bertikai karena selisih pendapat, dimulai dari tahun 1982 terjadi perselisihan antara Pemuda desa Sandaran dengan Pemuda Bali desa Balinuraga. Kemudian pertikaian antara warga Desa Margo Catur Kec. Kalianda dengan Desa Sidomakmur Kec. Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Konflik antar etnis Lampung dan Bali yang terjadi pada bulan Januari 2012 lalu di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, yang melibatkan ribuan orang. Sebagai puncaknya, konflik paling besar yang pernah terjadi di Lampung yaitu pada tanggal 28-29 Oktober 2012 lalu di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai contoh konflik yang terjadi di Kecamatan Sidomulyo pada bulan Januari 2012 yang lalu, yang pada dasarnya disebabkan pertikaian antara dua individu yang memicu konflik antar etnis dalam kasat mata. Secara singkat, awal kejadian yang berlokasi di pasar Sidomulyo, bermula dari seseorang datang ke lokasi pasar tepatnya nya di area parkir, kemudian seseorang tersebut berhenti dan mengeraskan suara motornya.

Oleh karena bising dan mengganggu seorang tukang parkir, lalu tukang parkir tersebut menegur secara baik-baik orang tersebut. Akan tetapi orang tersebut tidak terima dan memarahi serta memukul tukang parkir tersebut. Pada kasus ini, tukang parkir beretnis Lampung merupakan warga desa Kota Dalam dan orang tersebut beretnis Bali merupakan warga dusun Napal.

Masing-masing pihak tidak terima yang penyerangan dimulai dari warga dusun Napal yang menyerang dan membakar rumah-rumah warga desa Kota Dalam. Kemudian Warga Desa Kota Dalam balik menyerang warga dusun Napal dengan ribuan orang. Akhirnya konflik antar etnis pecah, yang pada dasar permasalahannya adalah pertikaian antara dua individu.

Menurut Michael E. Brown (dalam E. Brown,1997), konflik etnis seringkali digunakan secara fleksibel. Bahkan, dalam beberapa penggunaannya, kata ini justru digunakan untuk menggambarkan jenis konflik yang sama sekali tidak mempunyai basis etnis.

Konflik yang terjadi di Sidomulyo menimbulkan kerugian yang amat besar, baik korban materi harta benda, maupun korban luka-luka. Banyak orang yang kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka rusak dan dibakar oleh pihak yang bertikai. Sebanyak 60 rumah di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, dibakar massa menyusul bentrokan antarwarga di daerah itu. Selain itu, 23 rumah lainnya rusak parah.

(<http://www.lampungpost.com/index.php/home/pencarian-berita/38-ruwa-jurai/22631-bentrok-warga-sidomulyo-polda-lampung-tetapkan-siaga-i-html>). Di unduh tanggal 20 September 2012

Selanjutnya, masih menurut Bapak Erwin Bakar, Konflik yang terjadi antar warga Desa Agom dengan Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji bermula pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2012, sekelompok pemuda

asal Desa Balinuraga yang duduk dipersimpangan jalan Desa Waringin Harjo menggoda dua Gadis yang berasal dari Desa Agom sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor. Akibat godaan tersebut kedua gadis itu jatuh dari sepeda motornya dan luka-luka.

Kemudian kedua gadis itu melaporkan kejadian tersebut pada kedua orangtua mereka. Kedua orangtua gadis tersebut dan ditemani beberapa warga datang ke Desa Balinuraga berniat meminta pertanggung jawaban pada orangtua para pemuda Desa Balinuraga, akan tetapi orangtua pemuda tersebut tidak mau bertanggung jawab, dengan cepat informasi tersebut menyebar ke desa sekitar. Mereka hendak menyerang desa Balinuraga dan terjadilah pertikaian yang terbesar yang pernah terjadi di Bumi Lampung yang mengakibatkan kerugian besar.

Berikut kerusakan-kerusakan baik bangunan maupun kendaraan bermotor akibat konflik di Kabupaten Lampung Selatan tersebut :

Tabel 1. Daftar Kerusakan akibat konflik di Kabupaten Lampung Selatan

No	Jenis	Dibakar (unit)	Dirusak (unit)	Milik
1.	Rumah	166	26	Balinuraga-Sidoreno
2.	Sepeda Motor	11	-	Idem
3.	Gd.SDN Balinuraga	-	1	Idem
4.	Gd.SMP Dharma Bhakti	1	-	Idem
5.	Pura Banjar	1	-	Idem
6.	Kendaraan Roda Empat			
	• Isuzu Panther	1	-	Polda Lampung
	• Honda CRV	-	1	Balinuraga
	• Mitsubishi	-	1	Idem
7.	Kawat Barrier	-	1	Polda Lampung

Sumber : Radar Lampung (31 Oktober 2012)

Selanjutnya nama-nama korban yang meninggal akibat konflik tersebut :

Tabel 2. Daftar Nama-nama korban meninggal dunia akibat konflik

No.	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN
1.	Yahya	30 Th	Laki-Laki
2.	Marhadan	35 Th	Idem
3.	Alwin	35 Th	Idem
4.	Rusnadi Alias Made Petis	45-55 Th	Idem
5.	Pan Malini Alias Nyoman Sukarma	50-60 Th	Idem
6.	Terat Alias Ratminingsih Alias Wayan Paing	45-56 Th	Idem
7.	Wayan Kare	40-50 Th	Idem
8.	Muriyati	55-65 Th	Perempuan
9.	Gede Semarajaya	20-30 Th	Laki-Laki
10.	Pan Kare	60-70 Th	Idem
11.	Ketut Buder	55-65 Th	Idem
12.	Pan Ladri Alias Ketut Parta	60 Th	Idem

Sumber : Radar Lampung (02 November 2012)

Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan, Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyaai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
2. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
3. Pelaksanaan tugas dan pengendalian kegiatan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat

4. Pengelolaan Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat
5. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat dan penyiapan bahan penyelesaian masalah.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat
7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Polres Lampung Selatan, tokoh adat, masyarakat, agama, pemuda dan instansi-instansi Pemerintah yang terkait untuk menangani konflik di Sidomulyo. Selain itu Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan juga bekerjasama dengan Sekretariat Daerah bidang Tata Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, melakukan mediasi dengan kedua belah pihak konflik, yaitu etnis Lampung dan Bali.

Pada forum mediasi, pihak Pemerintah maupun pihak yang berkonflik mencari sumber atau akar permasalahan yang menyebabkan konflik antar etnis pecah. Kemudian bersama-sama mencari solusi agar masalah konflik

antar etnis ini bisa terselesaikan dengan baik dan tidak terulang kembali di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

“Bagaimanakah Pola Koordinasi Antara Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Dengan Aparat Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Etnis Di Kabupaten Lampung Selatan?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pola Koordinasi Antara Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Dengan Aparat Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Etnis Di Kabupaten Lampung Selatan”.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai penambah wawasan dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah Teori Manajemen Organisasi dan Politik Multikultural, serta hal-hal berhubungan dengan bentuk dan pelaksanaan koordinasi dalam penyelesaian konflik antar etnis Di Kabupaten Lampung Selatan.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbang saran dan pemikiran bagi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dan Aparatur Kepolisian Polres Kabupaten Lampung Selatan.